



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana,
Indonesia.

***Correspondence:**

supatmi.supatmi@uksw.edu

DOI: 10.22219/jaa.v5i1.19507

Sitasi:

Supatmi, S., Handayani, L. (2022).
Koneksi Politik Dan Praktik
Manajemen Laba Riil: Studi Pada
Industri Keuangan Di Indonesia.
Jurnal Akademi Akuntansi, 4(2), 121-
134.

Proses Artikel

Diajukan:

03 Januari 2022

Direviu:

04 Januari 2022

Direvisi:

27 Februari 2022

Diterima:

28 Februari 2022

Diterbitkan:

28 Februari 2022

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Type Artikel: Paper Penelitian

KONEKSI POLITIK DAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA RIIL: STUDI PADA INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA

Supatmi Supatmi^{1*}, Lilis Handayani²

ABSTRACT

The aim of the research is to find empirical evidence of the impact of political ties on the management of actual earnings in the Indonesian financial industry. Earnings management in this study is measured by real earnings management, namely abnormal CFO, and abnormal discretionary expense, as well as the value of Allowance for Impairment Losses (CKPN). The research sample is 98 companies that are members of the financial industry listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2020 period with a total of 294 observations. This research used the panel data regression analysis technique. The results showed that the politically connected board of commissioners had a positive effect on earnings management as measured by abnormal CFO and CKPN but had no effect on earnings management as measured by abnormal discretionary expense. Meanwhile, the politically connected board of directors was found to have no effect on earnings management, either as measured by abnormal CFO, abnormal discretionary expense, or CKPN. This research provides additional empirical evidence that is advantageous for several parties such as companies, investors, and regulators regarding the consideration of political connected council that have a negative effect on earnings management. The results of this study support the agency theory that political connections increase agency problems through earnings management practices.

KEYWORDS: Board, Political Connection, Real Earnings Management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris efek dari koneksi politik pada manajemen laba riil di industri keuangan Indonesia. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan manajemen laba riil, yaitu abnormal CFO dan abnormal discretionary expense, serta nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sampel penelitian ini adalah 98 perusahaan yang tergabung dalam industri keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2020 dengan jumlah observasi 294. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang diukur dengan abnormal CFO dan CKPN namun tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang diukur dengan abnormal discretionary expense. Sementara itu, dewan direksi terkoneksi politik ditemukan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, baik yang diukur dengan abnormal CFO, abnormal discretionary expense, maupun CKPN. Hasil penelitian mendukung teori agensi bahwa koneksi politik meningkatkan masalah agensi melalui praktik manajemen laba.

KATA KUNCI: Dewan, Koneksi Politik, Manajemen Laba Riil



© 2022 Supatmi Supatmi, Lilis Handayani

Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Laporan keuangan mengandung informasi material yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari tanggung jawab manajemen mengatur sumber daya dan kemampuan dalam memperoleh laba. Selain itu, laporan keuangan berguna untuk keputusan investasi para *shareholders*. Salah satu informasi material dalam laporan keuangan yang menjadi tolak ukur kinerja perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh *stakeholders* maupun *shareholders* adalah informasi laba (Panjaitan & Muslih, 2019). Karena pentingnya informasi laba tersebut dapat menimbulkan perbedaan kepentingan pada pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) (Feviana & Supatmi, 2021), yaitu manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba yang berpotensi merugikan kepentingan pemilik perusahaan. Hal serupa diungkapkan Ghorbani & Salehi (2021), bahwa salah satu bentuk masalah agensi adalah ketika perusahaan melakukan manajemen laba. Tingginya intensitas manajemen laba mendorong masalah agensi semakin tinggi disebabkan adanya ketidaksesuaian pada manajer dengan pemegang saham.

Manajemen laba menjadi salah satu permainan akuntansi dengan mengubah besar dan kecilnya angka laporan keuangan sehingga mengakibatkan pengguna laporan keuangan tidak memperoleh informasi yang valid dan memadai (Agustia & Suryani, 2018). Di Indonesia, persoalan manajemen laba pernah dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya diduga melakukan rekayasa akuntansi atau *window dressing* yaitu mengungkapkan laba semu sejak tahun 2006 dan kembali pada 2017 perusahaan memperoleh laba Rp 2,4 triliun tetapi terindikasi tidak wajar (Putri, 2020).

Salah satu penyebab perusahaan termotivasi mempraktikkan manajemen laba adalah adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan (Puspitasari & Nugrahanti, 2016). Menurut Faccio (2006), apabila terdapat *shareholders* terbesar maupun dewan direksi menjadi bagian dari parlemen, menteri ataupun pemimpin negara, maupun memiliki keterkaitan erat dengan politisi dapat dikatakan perusahaan terkoneksi politik. Sedangkan menurut Habib *et al.* (2017), perusahaan berkoneksi politik apabila terdapat salah satu pemilik saham terbesar (memiliki minimal 10% hak suara) atau anggota dewan, dan atau komisaris merupakan anggota atau mantan parlemen, menteri atau kepala pemerintahan, atau terkait dengan politisi atau partai.

Perusahaan yang terkoneksi politik dapat membawa manfaat positif bagi perusahaan menurut sudut pandang teori ketergantungan sumber daya (Supatmi *et al.*, 2021). Berbagai manfaat positif yang diperoleh adalah hak monopoli, berbagai macam kontrak yang menguntungkan, subsidi pemerintah, dan perlindungan politik (Tee, 2018). Namun dari sisi teori agensi, koneksi politik dapat mengarahkan perusahaan pada dampak negatif salah satunya meningkatkan manajemen laba (Zhao *et al.*, 2019). Perusahaan akan memiliki kualitas laba yang rendah apabila terkoneksi politik, untuk mengelola keuntungan yang timbul dari hasil keterikatan dengan politisi (Al-dhamari & Ismail, 2015). Koneksi politik juga dipandang sebagai sumber korupsi karena akan memudahkan pemerintah atau pejabat untuk melakukan *rent-seeking* (Zhao *et al.*, 2019). Perusahaan terkoneksi politik memiliki efek negatif yaitu berisiko tinggi (Ling *et al.*, 2016) yang ditunjukkan dengan *leverage* yang tinggi, pembayaran dividen yang rendah, tingginya aktivitas pencairan sewa, dan *tunneling* (Habib *et al.*, 2017) serta berpotensi menghadapi kegagalan bisnis (Supatmi *et al.*, 2021).

Hasil penelitian dampak koneksi politik terhadap praktik manajemen laba ditemukan bervariasi. Chaney *et al.* (2010), membuktikan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan berkoneksi politik berkualitas lebih rendah daripada perusahaan tidak terkoneksi politik.

Dengan menggunakan sampel penelitian di 19 negara, hasil penelitian menemukan perusahaan terkoneksi politik bertujuan melakukan manajemen laba untuk mengurangi tekanan pasar. [Jiang et al. \(2018\)](#), membuktikan bahwa perusahaan di Cina yang terkoneksi politik akan melakukan manajemen laba saat berkinerja buruk agar tetap menerima subsidi pemerintah. [Habib et al. \(2017\)](#), menemukan perusahaan terkoneksi politik yang tercatat di BEI pada tahun 2007-2013 akan lebih berpotensi melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh [Attia et al. \(2016\)](#), dengan menggunakan sampel perusahaan di Tunisia yang membuktikan eksekutif perusahaan yang terkoneksi politik tidak secara langsung berhubungan dengan manajemen laba. Justru perusahaan yang tidak terkoneksi politik dan dikendalikan oleh negara ditemukan menggunakan kebijakan akuntansi untuk menurunkan labanya ketika terdapat biaya politik yang tinggi. Sementara itu Puspitasari & Nugrahanti (2016), dengan sampel penelitian di Indonesia menemukan koneksi politik yang dimiliki perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada manajemen laba di sektor manufaktur.

Penelitian tentang pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba sebagian besar dilakukan dengan sampel penelitian pada industri non keuangan maupun manufaktur, masih sedikit penelitian yang menguji dengan sampel industri keuangan. Di antaranya, [Faccio et al. \(2006\)](#) dan [Braam et al. \(2015\)](#) yang menggabungkan beberapa industri, salah satunya industri keuangan, dengan data dari berbagai negara dan [Putri \(2019\)](#) yang menggunakan sampel industri keuangan di Indonesia 2015-2019. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris efek dari koneksi politik pada manajemen laba di industri keuangan yang tercatat pada BEI periode 2018-2020. Industri keuangan yang terdiri dari perbankan, asuransi, dan pembiayaan, merupakan industri yang diatur dengan ketat atau industri yang dikendalikan oleh peraturan yang berlaku ([Putri & Supatmi, 2020](#)) sehingga akan memberikan hasil penelitian yang dimungkinkan berbeda dengan industri non keuangan. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak mengukur koneksi politik melalui variabel *dummy*, apakah terdapat koneksi politik atau tidak. Kelemahan menggunakan variabel *dummy* adalah tidak membedakan tinggi dan rendahnya dewan terkoneksi politik, dimungkinkan terjadi multikolinieritas sempurna, dan dapat menurunkan kekuatan statistik pada efek tetap regresi data panel. Koneksi politik dalam perusahaan di penelitian ini akan diukur menggunakan jumlah dewan yang terkoneksi politik pada perusahaan, baik dewan komisaris maupun dewan direksi. Selain fokus pada dewan komisaris selaku pengawas dan dewan direksi selaku pengelola perusahaan, pengukuran ini akan mampu menunjukkan dampak tinggi rendahnya koneksi politik yang dimiliki perusahaan, bukan hanya sekedar keberadaan koneksi politik.

Penelitian ini juga menggunakan pengukuran manajemen laba yang masih sedikit digunakan, yaitu manajemen laba riil menurut [Roychowdhury \(2006\)](#). [Roychowdhury \(2006\)](#) menyatakan bahwa peningkatan manajemen laba riil pada tingkat penjualan tertentu, dapat dideteksi jika arus kas dari operasi perusahaan negatif, beban diskresionari sangat rendah, dan biaya produksi sangat tinggi. Penelitian ini juga menambahkan pengukuran manajemen laba riil menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang merupakan akun yang khas di industri keuangan. CKPN menyajikan perkiraan kerugian yang terjadi dari saldo pinjaman maupun investasi yang belum selesai sehingga CKPN berpotensi untuk dimanipulasi oleh manajer ([Sari et al., 2017](#)).

Riset ini diharapkan dapat memberi tambahan bukti empiris koneksi politik terhadap manajemen laba dari sudut pandang teori agensi, khususnya pada industri keuangan di Indonesia. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

penentuan komposisi anggota dewan dan praktik manajemen laba agar terhindar dari risiko masa depan. Investor diharapkan dapat terbantu dalam memutuskan perencanaan investasi terkait dampak dewan terkoneksi politik terhadap pelaksanaan manajemen laba. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perumusan kebijakan yang tepat untuk menyusun dan mengawasi manajemen laba dan komposisi dewan di industri keuangan Indonesia.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan terkoneksi politik memiliki risiko yang tinggi dan lebih dimungkinkan mengalami kegagalan bisnis (Supatmi et al., 2021). Untuk mengurangi risiko tersebut manajemen laba dilakukan perusahaan untuk memodifikasi perusahaan seolah mencapai kinerja bagus (Chaney et al., 2010). Teori agensi digunakan oleh perusahaan untuk memitigasi hubungan antara *agent* dan *principal* (Pranesti & Kusuma, 2022). Semakin tinggi perusahaan terkoneksi politik, semakin tinggi juga perusahaan melakukan manajemen laba untuk mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Al-dhamari & Ismail (2015) bahwa kualitas informasi yang terdapat di laporan keuangan banyak terpengaruh ketika koneksi politik ada di perusahaan.

Beberapa hasil penelitian menemukan koneksi politik dalam perusahaan akan menyebabkan kualitas laba yang semakin rendah. Dewan perusahaan akan memengaruhi praktik manajemen laba dengan arah yang berlawanan. Selain itu, dewan perusahaan yang terkoneksi politik akan mendorong praktik manajemen laba semakin tinggi, berkinerja buruk, serta memiliki kualitas laba yang rendah (Darmayanti et al., 2021). Keterikatan politik dewan perusahaan akan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan aktivitas perusahaan, termasuk kebijakan yang terkait dengan praktik manajemen laba. Dewan direksi berfungsi sebagai pengelola perusahaan namun jika dewan direksi terkoneksi politik maka akan rentan dengan praktik manajemen laba. Manajemen laba dilakukan untuk mendorong capaian target, mempertahankan reputasi dan keterikatan politik yang sudah terjalin (Braam et al., 2015) sehingga dapat mendukung kepentingan politiknya. Demikian halnya dengan dewan komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap dewan direksi, yaitu dewan komisaris yang terkoneksi politik tidak akan dapat melakukan pengawasan secara optimal, termasuk pengawasan atas praktik manajemen laba yang dilakukan dewan direksi.

Hal ini sejalan dengan Braam et al. (2015), yang menemukan bahwa perusahaan terkoneksi politik lebih berpotensi melakukan manajemen laba riil dengan tujuan mempertahankan reputasi dan keterikatan politik yang sudah terjalin. Perusahaan terkoneksi politik akan melakukan manajemen laba untuk mengurangi tekanan pasar (Chaney et al., 2010). Perusahaan yang terkoneksi politik dan melakukan transaksi pihak berelasi lebih terlibat dalam praktik manajemen laba (Habib et al., 2017). Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁ : Dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

H₂ : Dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

METODE

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berbentuk laporan tahunan perusahaan dalam industri keuangan yang tercatat di BEI tahun 2018-2020. Selain kebaruan data, periode penelitian 2018-2020 dipilih dengan pertimbangan untuk mengetahui efek pandemi covid-19 (2020) terhadap hubungan kausalitas koneksi politik

dengan praktik manajemen laba di industri perbankan. Dalam hal ini, kondisi sebelum (2018-2019) dan pada saat terjadinya pandemi covid-19 (2020) diakomodasi sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitian ini. Laporan tahunan diambil dari *website* www.idx.co.id atau situs perusahaan terkait.

Populasi penelitian menggunakan industri keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2020. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria seperti tersaji dalam Tabel 1.

| No. | Kriteria | Jumlah |
|------------------------------|--|--------|
| 1 | Perusahaan industri keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2020. | 105 |
| 2 | Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode tahun 2018 – 2020. | (7) |
| 3 | Perusahaan yang tanggal berakhirnya laporan keuangan bukan 31 Desember selama periode tahun 2018 – 2020. | (0) |
| 4 | Perusahaan yang tidak memiliki data mengenai informasi profil dewan perusahaan 2018 – 2020. | (0) |
| Jumlah sampel akhir | | 98 |
| Periode penelitian 2018-2020 | | 3 |
| Jumlah observasi | | 294 |

Tabel 1.
Penentuan Sampel Penelitian

Sumber: Data diolah, 2021

Variabel dependen penelitian adalah manajemen laba (ML) yang diukur dengan manajemen laba riil sesuai pendekatan [Roychowdhury \(2006\)](#) dan [Kassamany et al. \(2017\)](#), yaitu:

1. *Abnormal CFO* (Manipulasi Penjualan)

$$CFO_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_t/A_{t-1}) + \alpha_3(\Delta S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

CFO_t : *cash flow from operating activities* (arus kas operasi) perusahaan i pada tahun t

A_{t-1} : aset total perusahaan i tahun t-1

S_t : total penjualan perusahaan i tahun t-1

2. *Abnormal Discretionary Expenses* (Penurunan Beban – Beban Diskresionari)

$$DISEXP_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

DISEXP : biaya penelitian dan pengembangan ditambah biaya iklan ditambah biaya penjualan, administrasi, dan umum.

3. *Abnormal Production Cost* (Produksi yang Berlebihan)

$$PROD_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_t/A_{t-1}) + \alpha_3(\Delta S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

$PROD_t$: harga pokok penjualan ditambah perubahan sediaan.

Namun, pengukuran manajemen laba riil tersebut tidak relevan dengan industri keuangan karena bergerak di sektor jasa sehingga *abnormal production cost* tidak digunakan dalam penelitian ini.

Abnormal CFO, *abnormal discretionary expenses*, dan *abnormal production* yang menjadi pengukuran manajemen laba riil diperoleh dari nilai error (ϵ_t) setiap rumus regresi di atas (Roychowdhury, 2006). Makin tinggi nilai error tersebut menunjukkan makin tinggi juga perusahaan melakukan manajemen laba riil berdasarkan pengukuran *abnormal CFO*, *abnormal discretionary expenses*, dan *abnormal production*.

Penelitian ini juga menambahkan pengukuran manajemen laba riil menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN menyajikan perkiraan kerugian yang terjadi dari saldo pinjaman maupun investasi yang belum selesai sehingga CKPN berpotensi untuk dimanipulasi oleh manajer (Sari et al., 2017). Pengukuran CKPN menggunakan nilai CKPN yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dibagi dengan total aset perusahaan akhir periode yang sama.

Koneksi politik sebagai variabel bebas atau independen pada penelitian ini menggunakan ukuran jumlah dewan, baik dewan komisaris (DK) maupun dewan direksi (DD), yang memiliki koneksi politik. Dalam penelitian ini untuk menentukan kriteria dari dewan terkoneksi politik menggunakan acuan Supatmi (2020) yang mengangkat Faccio (2006), Faccio et al. (2006), Habib et al. (2017), Wu et al. (2012), yaitu dewan perusahaan yang saat ini menjadi atau mantan kepala negara, parlemen, militer, pejabat kementerian, lembaga pemerintahan lainnya, pimpinan pemerintah daerah, atau memiliki keterkaitan dekat (keluarga) maupun hubungan sahabat dengan politisi atau partai. Selain itu, hasil penelitian terdahulu digunakan juga sebagai acuan apabila diketahui seseorang atau perusahaan terkoneksi politik.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (UP) melalui logaritma natural total aset, *leverage* (LV) yang diukur dengan pembagian dari total utang dengan total aset perusahaan serta kualitas audit (KA) yang diukur dengan variabel *dummy*, yaitu perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big-4* diberi angka 1 dan yang lainnya diberi angka 0. Untuk mengakomodasi dampak pandemi *Covid-19* selama periode penelitian (TP), penelitian ini menambahkan variabel kontrol tambahan dengan memberi skor 1 pada periode 2020 sebagai masa pandemi *Covid-19* dan skor 0 periode 2018-2019 sebagai masa bukan pandemi *Covid-19*.

Teknik analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pengujian regresi data panel menggunakan program pengolahan data *Eviews 9* dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$MLit = \alpha_0 + \alpha_1 DKit + \alpha_2 DDit + \alpha_3 UPit + \alpha_4 LVit + \alpha_5 KAit + \alpha_6 TPit + \epsilon it$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran data untuk setiap variabel yang digunakan penelitian ini dapat dilihat di tabel 2.

| | Mean | Maximum | Minimum | Std. Dev. |
|-------|----------|---------|---------|-----------|
| ABCFO | -0,000 | 4,191 | -5,851 | 0,998 |
| ABD | 3,40E-08 | 9,327 | -5,976 | 0,998 |
| CKPN | 0,020 | 0,270 | 0,000 | 0,033 |
| DD | 0,133 | 3,000 | 0,000 | 0,378 |
| DK | 0,884 | 11,000 | 0,000 | 1,646 |
| LV | 0,677 | 8,659 | 0,000 | 0,760 |
| UP | 29,580 | 34,952 | 22,641 | 2,284 |

| Variabel penelitian | Jumlah | Proporsi |
|--------------------------|--------|----------|
| Kualitas Audit (KA) | | |
| KAP <i>Big-4</i> (1) | 115 | 39,12% |
| Non KAP <i>Big-4</i> (0) | 179 | 60,88% |
| Tahun Pandemi (TP) | | |
| Periode 2020 (1) | 98 | 33,33% |
| Periode 2018-2019 (0) | 196 | 66,67% |

Tabel 2.
Deskriptif Statistik

Keterangan:

ABCFO: *Abnormal CFO*; ABD: *Abnormal discretionary expense*; CKPN: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai; DD: Dewan direksi terkoneksi politik; DK: Dewan komisaris terkoneksi politik; TP: Tahun pandemi; KA: Kualitas Audit; LV: *Leverage*; UP: Ukuran perusahaan

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2, nilai rata – rata *abnormal CFO* (ABCFO) lebih besar daripada *abnormal discretionary expense* (ABD) yang menunjukkan bahwa praktik manajemen laba riil pada industri keuangan dengan menggunakan *abnormal CFO* lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan *abnormal discretionary expense* (Roychowdhury, 2006). Sementara itu, nilai rata-rata Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 0,020 yang berarti secara rata-rata perkiraan kerugian yang terjadi dari saldo pinjaman maupun investasi yang belum selesai pada industri keuangan selama periode penelitian adalah sebesar 1,9% dari total asetnya.

Selama periode 2018-2020 jumlah dewan terkoneksi politik di industri keuangan, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, terbilang rendah, Namun jumlah dewan komisaris terkoneksi politik secara rata-rata lebih tinggi daripada jumlah dewan direksi terkoneksi politik karena dari 98 perusahaan industri keuangan hanya 12 diantaranya yang memiliki dewan direksi terkoneksi politik. Sementara itu, hampir semua perusahaan sampel memiliki dewan komisaris terkoneksi politik dan dari 294 observasi terdapat 114 observasi perusahaan yang memiliki dewan komisaris terkoneksi politik. Jumlah dewan direksi terkoneksi politik tertinggi dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM)

dengan jumlah 3 dewan direksi terkoneksi politik pada tahun 2018. Jumlah dewan komisaris terkoneksi politik tertinggi adalah 11 dewan komisaris pada Bank Mandiri (BMRI) periode 2020.

Ukuran perusahaan (UP) pada industri keuangan berada pada kisaran Rp 29,58 triliun dengan leverage yang menunjukkan aset yang dimiliki industri keuangan sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga. Dari sisi kualitas audit, industri keuangan selama periode penelitian lebih banyak menggunakan jasa auditor dari Non KAP *Big-4* dibandingkan KAP *Big-4*.

Pada tahapan pengujian data penelitian, ditemukan adanya data *outlier*. Analisis data *outlier* dengan menggunakan batasan nilai Zscore $> 2,5$ atau $< -2,5$ (Hair et al., 2014) sehingga ditemukan 11 data *outlier* untuk pengujian variabel dependen ABCFO, 7 data *outlier* untuk pengujian variabel dependen ABD, dan 45 data *outlier* untuk pengujian variabel dependen CKPN. Distribusi jumlah observasi riset per sektor industri keuangan setelah data *outlier* dibuang tersaji dalam Tabel 3.

| Sektor | ABCFO | | ABD | | CKPN | |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| Sektor Perbankan | 128 | 45% | 132 | 46% | 131 | 53% |
| Sektor Keuangan | 41 | 14% | 45 | 16% | 45 | 18% |
| Sektor Asuransi | 42 | 15% | 42 | 14% | 33 | 13% |
| Sektor Lainnya/Umum | 72 | 26% | 68 | 24% | 40 | 16% |
| Total | 283 | 100% | 287 | 100% | 249 | 100% |

Sumber: Data diolah, 2021

Selanjutnya, hasil pengujian asumsi klasik berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa bahwa data lolos uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. Namun, untuk pengujian variabel dependen ABD dan CKPN ditemukan data berdistribusi tidak normal seperti terlihat dalam Tabel 4.

| | ABCFO | ABD | CKPN |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Uji Normalitas (Prob. Jarque-Bera) | 0,108 (Data berdistribusi normal) | 0,000 (Data berdistribusi tidak normal) | 0,000 (Data berdistribusi tidak normal) |
| Uji Multikolinearitas (Nilai korelasi $> 0,08$) | Tidak terdapat multikolinearitas | Tidak terdapat multikolinearitas | Tidak terdapat multikolinearitas |
| Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) | Sebagian signifikan | Semua tidak signifikan | Semua tidak signifikan |
| Uji Autokorelasi (nilai Durbin-Watson) | 1,810 (Tidak ada autokorelasi) | 2,100 (Tidak ada autokorelasi) | 1,840 (Tidak ada autokorelasi) |

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 3.
Distribusi Jumlah Observasi Riset per Sektor Industri Keuangan

Tabel 4.
Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan *Central Limit Theorem* (CLT) apabila jumlah sampel lebih dari 30 maka distribusi sampel dapat dikatakan normal (Nurudin et al., 2014). Penelitian ini menggunakan 98 sampel atau sekitar 93,33% dari 105 populasi industri keuangan di Indonesia sehingga menggunakan konsep CLT tersebut pengujian hipotesis dapat dilanjutkan karena sampel hampir mendekati populasi. Dalam uji heteroskedastisitas tidak terdapat masalah dalam pengamatan ABD dan CKPN, kecuali ABCFO. Untuk itu, dalam pengujian untuk ABCFO model regresi data panel menggunakan *cross-section weight*. Tabel 5 menyajikan ringkasan hasil uji estimasi regresi data panel untuk setiap pengujian variabel dependen.

| Variabel Dependen | Chow Test | Hausman Test | Lagrange Multiplier Test | Kesimpulan Model yang Tepat |
|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| ABCFO | 0,001 | 0,090 | 0,271 | Common Effect Model |
| ABD | 0,000 | 0,294 | 0,000 | Random Effect Model |
| CKPN | 0,000 | 1,000 | 0,000 | Random Effect Model |

Tabel 5.
Uji Estimasi Regresi Data Panel

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji *chow*, *hausman*, dan *lagrange multiplier* (LM), model yang tepat digunakan untuk hipotesis ABCFO adalah *Common Effect Model* dengan cross section model sedangkan untuk pengujian ABD dan CKPN menggunakan *Random Effect Model*. Tabel 6 menyajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis untuk setiap variabel dependen.

| Variabel Penelitian | ABCFO | | ABD | | CKPN | |
|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | Koefisien Regresi | Prob. | Koefisien Regresi | Prob. | Koefisien Regresi | Prob. |
| C | -0,471 | 0,096 | 0,167 | 0,412 | 0,155 | 0,002 |
| DD | -0,003 | 0,487 | -0,000 | 0,499 | 0,003 | 0,308 |
| DK | 0,030 | 0,002 | 0,023 | 0,211 | 0,003 | 0,038 |
| UP | 0,013 | 0,151 | -0,002 | 0,466 | -0,005 | 0,005 |
| KA | 0,001 | 0,493 | -0,065 | 0,207 | 0,000 | 0,462 |
| LV | -0,074 | 0,109 | -0,138 | 0,001 | -0,002 | 0,294 |
| TP | 0,269 | 0,000 | -0,059 | 0,052 | 0,012 | 0,000 |
| R ² | 0,198 | | 0,050 | | 0,105 | |
| Adjusted R ² | 0,180 | | 0,030 | | 0,082 | |
| F-statistic | 11,286 | 0,000 | 2,469 | 0,012 | 4,713 | 0,000 |

Tabel 6.
Uji Estimasi Regresi Data Panel

Keterangan: Definisi variabel dapat dilihat di Tabel 2.

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 ditemukan bahwa dewan komisaris terkoneksi politik terbukti berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba yang diukur dengan *abnormal CFO* dan CKPN. Namun, dewan komisaris terkoneksi politik tidak terbukti berpengaruh pada manajemen laba melalui pengukuran *abnormal discretionary expense*. Sementara itu, dewan direksi terkoneksi politik ditemukan tidak berpengaruh pada praktik manajemen laba, baik melalui pengukuran *abnormal CFO*, *abnormal discretionary expense* maupun CKPN. Dengan demikian, hipotesis 1 terdukung untuk variabel manajemen laba melalui pengukuran *abnormal CFO* dan CKPN namun hipotesis 2 tidak terdukung.

Dewan Komisaris Terkoneksi Politik dan Manajemen Laba

Semakin banyak dewan komisaris terkoneksi politik maka akan mendorong semakin tingginya praktik manajemen laba yang dilakukan industri keuangan dengan menggunakan *abnormal CFO* dan CKPN. Hal ini menunjukkan dewan komisaris terkoneksi politik dapat meningkatkan wewenangnya dalam pengawasan terkait besarnya arus kas operasi abnormal maupun nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dilakukan oleh industri keuangan.

Sejalan dengan [Attia et al. \(2016\)](#), perusahaan dengan dewan komisaris terkoneksi politik dimungkinkan memiliki kualitas laba yang lebih rendah karena tingginya manipulasi penjualan. Hal tersebut juga sejalan dengan [Ling et al. \(2016\)](#), dalam teori agensi bahwa semakin tinggi dewan terkoneksi politik maka memiliki pengaruh negatif bagi perusahaan. Dengan adanya koneksi politik akan meningkatkan beban keuangan dan pemborosan dalam alokasi sumber daya sosial sehingga berujung pada kinerja dan kualitas laba yang buruk. Dewan terkoneksi politik dapat mendorong pembentukan CKPN besar – besaran meskipun perbankan tidak memiliki risiko kredit yang mengkhawatirkan untuk tujuan manajemen laba. Temuan ini sejalan dengan sudut pandang teori agensi bahwa ketika dewan perusahaan terkoneksi politik akan mendorong terjadinya masalah keagenan, salah satunya manajemen laba. Dengan demikian hipotesis H₁ terdukung bahwa dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui pengukuran *abnormal CFO* dan CKPN.

Berbeda dengan temuan di atas, dewan komisaris terkoneksi politik ditemukan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba melalui pengukuran *abnormal discretionary expense*. Ini berarti dewan komisaris terkoneksi politik tidak membuat industri keuangan makin banyak melakukan praktik manajemen laba dengan menggunakan biaya diskresionari abnormal. *Discretionary expense* yang terdiri dari biaya *research and development*, biaya iklan, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang dikontrol manajemen dengan baik ([Lestari & Aeni, 2019](#)). Sehingga sulit dilakukan manajemen laba. Selain itu penurunan biaya diskresionari yang sangat rendah (*abnormal*) menimbulkan konsekuensi pembayaran pajak yang tinggi sehingga untuk manajemen laba melalui *abnormal discretionary expense* ada konsekuensi biaya yang tinggi. Ada kemungkinan regulasi yang ketat di industri keuangan juga menjadi penyebab dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap *abnormal discretionary expense*. Pengawasan yang ketat dilakukan untuk membatasi kemampuan dewan perusahaan dalam manajemen laba ([Kassamany et al., 2017](#)).

Dewan Direksi Terkoneksi Politik dan Manajemen Laba

Sementara itu, dewan direksi terkoneksi politik ditemukan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, baik yang diukur dengan *abnormal CFO*, *abnormal discretionary expense*, maupun CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi terkoneksi politik di industri keuangan tidak menyebabkan praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan meningkat. Ada kemungkinan peran dewan direksi terkoneksi politik terindikasi hanya sebagai perlindungan politik sehingga tidak berdampak terhadap operasional perusahaan.

Di samping itu, *operating cash flow* dan *discretionary expense* berkaitan dengan operasi sehari – hari perusahaan dan memiliki manajemen yang lebih ketat sehingga sulit untuk melakukan manajemen laba melalui *operating cash flow* maupun *discretionary expense* karena berkaitan langsung dengan operasional perusahaan ([Braam et al., 2015](#)). Selain itu pembentukan dana CKPN telah memiliki regulasi yang kuat, yaitu diatur dalam PSAK 55 yang diperbaharui dengan PSAK 71 per 2021 sehingga sulit untuk melakukan rekayasa melalui pembentukan CKPN. Ini sejalan dengan [Firmansyah & Irawan \(2018\)](#), yang menyebutkan bahwa di Indonesia praktik manajemen laba lebih dominan melalui aktivitas akrual daripada aktivitas riil.

Argumen lain yang bisa diberikan tidak terbuktinya dewan direksi terkoneksi politik akan meningkatkan praktik manajemen laba adalah jumlah dewan direksi terkoneksi politik pada industri keuangan tergolong rendah. Hanya 39 yang memiliki dewan direksi terkoneksi politik dari total 294 observasi (13 persen). Rendahnya jumlah dewan direksi terkoneksi politik berdampak pada pengambilan keputusan manajerial, yaitu peran yang tidak signifikan dalam praktik manajemen laba melalui penentuan CKPN maupun manajemen laba riil, yaitu *abnormal CFO* dan *abnormal discretionary expense*.

Tabel 6 menunjukkan koefisien regresi untuk pengujian ABCFO dan ABD berarah negatif, ini menunjukkan dewan direksi terkoneksi politik terindikasi justru akan mengurangi praktik manajemen laba melalui *abnormal CFO* maupun *abnormal discretionary expense*. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi bahwa dewan terkoneksi politik akan mendorong masalah agensi melalui praktik manajemen laba yang tinggi ([Ling et al., 2016](#)). Hasil penelitian ini lebih mendukung teori ketergantungan sumber daya yang memandang dewan terkoneksi politik akan berdampak positif bagi perusahaan ([Supatmi et al., 2021](#)).

Berdasarkan uji t untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap CKPN, leverage berpengaruh negatif terhadap *abnormal discretionary expense*. Masa pandemi covid-19 (tahun 2020) ditemukan berpengaruh positif terhadap *abnormal CFO* dan CKPN namun berpengaruh negatif terhadap *abnormal discretionary expense*. Hal ini membuktikan bahwa kondisi pandemi covid-19 mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan industri keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang diukur dengan abnormal CFO dan CKPN pada industri keuangan di Indonesia. Makin banyak dewan komisaris terkoneksi politik, makin tinggi manajemen laba yang dilakukan industri keuangan dengan menggunakan arus kas operasi abnormal maupun besarnya nilai CKPN. Namun, dewan komisaris terkoneksi politik ditemukan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dengan menggunakan beban diskresionari abnormal (*abnormal discretionary expense*). Sementara itu, dewan direksi terkoneksi politik ditemukan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, baik yang diukur dengan abnormal CFO, *abnormal discretionary expense*, maupun CKPN. Dewan direksi terkoneksi politik ditemukan tidak akan mendorong praktik manajemen laba pada industri keuangan.

Riset ini memberi tambahan bukti empiris terkait teori agensi bahwa dewan komisaris terkoneksi politik mendorong praktik manajemen laba riil pada industri keuangan di Indonesia. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan komposisi anggota dewan komisaris dan praktik manajemen laba agar terhindar dari risiko masa depan, khususnya tingginya komposisi dewan komisaris terkoneksi politik

dalam perusahaan. Investor diharapkan dapat terbantu dalam memutuskan perencanaan investasi terkait kualitas laba perusahaan akibat dari adanya manajemen laba. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perumusan kebijakan yang tepat, salah satunya terkait dengan kriteria dewan komisaris independen yang terkait dengan aspek koneksi politik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengukuran dewan terkoneksi politik yang belum mempertimbangkan tingkat jabatan yang dimiliki dewan saat menjadi anggota politik maupun jabatannya di perusahaan. Sehingga belum menunjukkan tingkat dewan terkoneksi politik dalam perusahaan. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memisahkan kondisi sebelum Covid-19 dan selama pandemic Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Y. P., & Suryani, E. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 71–82. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12571>
- Al-dhamari, R., & Ismail, K. N. I. K. (2015). Cash holding, political connection and earning quality. *International Journal of Managerial Finance*, 11(2), 215-231–751. <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/F-11-2014-0094>
- Attia, M. B. R., Lassoued, N., & Attia, A. (2016). Political costs and earnings management : Evidence from Tunisia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 388–407. <https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2013-0022>
- Braam, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. *International Journal of Accounting*, 50(2), 111–141. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009>
- Chaney, P., Faccio, M., & Parsley, D. (2010). The quality of accounting information in politically connected firms. *Munich Personal RePEc Archive*, 21116.
- Darmayanti, Y., Rifa, D., & Khairia, I. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap hubungan keterlibatan dewan di bidang politik dan manajemen laba. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 138–151. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.16659>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *The American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Feviana, D. L., & Supatmi, S. (2021). Good corporate governance affects company value with earnings management as intervening variables in BUMN. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i1.31530>
- Firmansyah, A., & Irawan, F. (2018). Adopsi IFRS, manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i2.3310>
- Ghorbani, A., & Salehi, M. (2021). Earnings management and the informational and disciplining role of debt: Evidence from Iran. *Journal of Asia Business Studies*, 15(1), 72–87. <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2019-0336>

- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections and related party transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis (Seventh Ed)*. Harlow : Pearson Education Limited.
- Jiang, H., Hu, Y., Zhang, H., & Zhou, D. (2018). Benefits of downward earnings management and political connection: Evidence from government subsidy and market pricing. *The International Journal of Accounting*, 53(4), 255–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intacc.2018.11.001>
- Kassamany, T., Ibrahim, S., & Archbold, S. (2017). Accrual and real-based earnings management by UK acquirers: Evidence from pre- and post-Higgs periods. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 13(4), 492–519. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2015-0073>
- Lestari, N., & Aeni, N. (2019). The effect of audit quality and earnings management on firm performance. *Social Science, Education and Humanities Research*, 377. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.7>
- Ling, L., Zhou, X., Liang, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. *Finance Research Letters*, 18, 328–333. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009>
- Nurudin, M., Mara, M. N., & Kusnandar, D. (2014). Ukuran sampel dan distribusi sampling dari beberapa variabel random kontinu. *Buletin Ilmiah Mat. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)*, 03(1), 1–6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/bbimst.v3i01.4461>
- Panjaitan, D. K., & Muslih, M. (2019). Manajemen laba: Ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kompensasi bonus (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15726>
- Pranesti, A., & Kusuma, I. W. (2022). The moderating effect of earnings management and dividend policy on relationship between corporate governance and institutional foreign ownership. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3), 600–617. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.18096>
- Puspitasari, A., & Nugrahanti, Y. W. (2016). Pengaruh hubungan politik, ukuran KAP, dan audit tenure terhadap manajemen laba riil. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 27–43. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.27-43>
- Putri, C. A. (2020, January 8). Kacaul BPK Sebut Jiwasraya Manipulasi Laba. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200108162637-17-128611/kacau-bpk-sebut-jiwasraya-manipulasi-laba>
- Putri, A.N. (2021). Pengaruh koneksi politik dan cash holding terhadap manajemen laba (Studi pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 9(2), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7456>
- Putri, V. A. K., & Supatmi. (2020). The effect of propping on the performance of the financial industry in Indonesia. *JURNAL AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*,

- 5(2), 129–139. <https://doi.org/http://doi.org/10.32486/aksi.v6i1.729>
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370.
- Sari, N. K., Turjono, E., & Widaninggar, N. (2017). Penerapan IFRS dalam praktik manajemen laba pada bank pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(2), 239–251. <https://doi.org/10.31093/jraba.v2i2.47>
- Supatmi. (2020). Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan dengan koneksi politik sebagai pemoderasi. Disertasi Yang Tidak Dipublikasikan (Universitas Brawijaya, Malang).
- Supatmi, S., Sutrisno, S., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2021). Abnormal related party transactions, political connection, and firm value: Evidence from Indonesian firms. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 461–478. <https://doi.org/10.33736/IJBS.3189.2021>
- Tee, C. M. (2018). Political connections and the cost of debt: Re-examining the evidence from Malaysia. *Journal of Multinational Financial Management*, 46, 51–62. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2018.05.003>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>
- Zhao, X., Ma, H., & Hao, T. (2019). Acquirer size, political connections and mergers and acquisitions performance: Evidence from China. *Studies in Economics and Finance*, 36(2), 311–332. <https://doi.org/10.1108/SEF-05-2017-0112>